

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Bantul - DI Yogyakarta 55198

Telp./WA (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

E-mail : ptunjogja@mahkamahagung.go.id



LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.05

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN

TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Telp./WA (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

Bantul - DI Yogyakarta 55198

E-mail : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H
NIP.197109061999032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	3
Pernyataan Tanggung Jawab.....	3
Ringkasan.....	6
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	9
II. Neraca.....	12
III. Laporan Operasional.....	14
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	16
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	18
A. Penjelasan Umum.....	18
A.1. Dasar Hukum.....	18
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.....	18
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	20
A.4. Basis Akuntansi.....	20
A.5. Dasar Pengukuran.....	20
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	21
(1.) Pendapatan LRA.....	21
(2.) Pendapatan LO.....	21
(3.) Belanja.....	22
(4.) Beban.....	22
(5.) Aset.....	22
a. Aset Lancar.....	23
b. Aset Tetap.....	24
c. Penyusutan Aset Tetap.....	24
d. Piutang Jangka Panjang.....	25
e. Aset Lainnya.....	26
(6.) Kewajiban.....	27
(7.) Ekuitas.....	27
A.7. Capaian Output.....	27

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	29
B.1. Pendapatan.....	29
B.2. Belanja.....	30
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	32
Aset.....	32
Aset Lancar.....	32
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	32
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas.....	32
C.3. Persediaan.....	33
Kewajiban Jangka Pendek.....	34
C.4. Utang kepada Pihak Ketiga.....	34
C.5. Utang Yang Belum Ditagihkan.....	34
C.6. Uang Muka dari KPPN.....	35
EKUITAS.....	35
C.7. Ekuitas.....	35
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	35
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	35
D.2. Beban Barang dan Jasa.....	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
E.1. Ekuitas Awal.....	37
E.2. Surplus (defisit) LO.....	37
E.3. Transaksi Antar Entitas.....	37
E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	38
E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	38
E.4. Ekuitas Akhir.....	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	39
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	39
F.2. Pengungkapan Lain-lain.....	39
F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK.....	39
F.2.2. Rekening Pemerintah.....	39
F.2.3. Revisi DIPA.....	39
F.2.4. Catatan Penting Lainnya.....	40

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No. 66 Banguntapan Bantul - DI Yogyakarta 55198

Telp./WA (0274) 520502 Fax. (0274) 581675 email: ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada 30 Juni Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, Juli 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,



RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H
NIP.197109061999032001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.232.000 atau mencapai 51,46 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 6.281.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 15.500.000 atau mencapai 37,99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 40.805.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 22.789.349.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 5.039.349 dan Rp 17.750.000.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 3.232.000, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 15.700.000 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (12.468.000), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing surplus/(defisit) sebesar Rp 0 dan surplus/(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (12.468.000).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 0 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (12.468.000) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 30.218.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 17.750.000.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LRA

PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

No	URAIAN	Cat.	2025				2024			
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1	6.281.000	3,232,000	(3.049.000)	51,46	4.364.000	2.053.000	(2.311.000)	47,04
	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1	6.281.000	3,232,000	(3.049.000)	51,46	4.364.000	2.053.000	(2.311.000)	47,04
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	6.281.000	3,232,000	(3.049.000)	51,46	4.364.000	2.053.000	(2.311.000)	47,04
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1	6.281.000	3,232,000	(3.049.000)	51,46	4.364.000	2.053.000	(2.311.000)	47,04

B	BELANJA	B.2	40.805.000	15.000.000	(25.305.000)	37,99	42.310.000	19.080.750	(23.229.250)	45,1
	Belanja Pegawai		0	0	0	0	0	0	0	0
	Belanja Barang	B.2	40.805.000	15.000.000	(25.305.000)	37,99	42.310.000	19.080.750	(23.229.250)	45,1
	Belanja Modal		0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA	B.2	40.805.000	15.000.000	(25.305.000)	37,99	42.310.000	19.080.750	(23.229.250)	45,1
C	PEMBIAYAAN		0	0	0	0	0	0	0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Bantul, Juli 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran,
 KPA

 RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H
 NIP.197109061999032001

NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

NERACA

PER 30 Juni 2025

(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Cat.	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
		2025	2024	Jumlah	%
1		2	3	3	5
ASET					
Aset Lancar					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	550.000	0	550.000	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	4.289.349	0	4.289.349	0,00
Persediaan	C.3	17.950.000	0	17.950.000	0,00
Jumlah Aset Lancar		22.789.349	0	22.789.349	
Jumlah Aset		22.789.349	0	22.789.349	
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4	4.289.349	0	4.289.349	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5	200.000	0	200.000	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.6	550.000	0	550.000	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.039.349	0	5.039.349	
Jumlah Kewajiban		5.039.349	0	5.039.349	
EKUITAS					
Ekuitas					
Ekuitas	C.7	17.750.000	0	17.750.000	0,00
Jumlah Ekuitas		17.750.000	0	17.750.000	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		22.789.349	0	22.789.349	

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Bantul, 30 Juni 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 KPA

 R.R. Asnur Dwi Mastuti
 197109061999032001

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

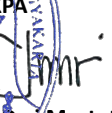
LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 JUNI 2025

(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Cat.	Jumlah		Kenaikan (penurunan)	
		2025	2024	Jumlah	%
1		2	3	4	5
Kegiatan Operasional					
Pendapatan					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	3.232.000	2.053.000	1.179.000	57,428
Jumlah Pendapatan (A)		3.232.000	2.053.000	1.179.000	57,428
Beban					
Beban Barang dan Jasa	D.2	15.700.000	19.080.750	(3.380.750)	(17,18)
Jumlah Beban (B)		15.700.000	19.080.750	(3.380.750)	(17,18)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional (C=A-B)		(12.468.000)	(17.027.750)	4.559.750	(26,778)
Kegiatan Non Operasional		0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(12.468.000)	(17.027.750)	4.559.750	(26,778)
POS LUAR BIASA		0	0	0	0
Jumlah Pos Luar Biasa		0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT – LO		(12.468.000)	(17.027.750)	4.559.750	(26,778)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Yogyakarta, Juli 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 KPA

 RR. Asnuri Dwi Mastuti
 197109061999032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1		2	3	4	5
Ekuitas Awal	E.1	0	0	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(12.468.000)	(17.027.750)	4.559.750	(26,78)
Transaksi Antar Entitas	E.3	30.218.000	17.027.750	13.190.250	77,46
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		17.750.000	0	17.750.000	0
Ekuitas Akhir	E.4	17.750.000	0	17.750.000	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Yogyakarta, Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

Rr. Asnuri Dwi Mastuti
197109061999032001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- g. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 3 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga;
- i. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2025;
- j. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4743/SEK/KU.00/VII/2025 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2025.
- k. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025 Hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April – November 2025.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan satuan kerja yang mempunyai tupoksi Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaku kekuasaan

kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung RI, dan berlokasi di Jl. Janti No. 66 Banguntapan, Bantul. sebagai satuan kerja pemerintah tentunya juga memiliki kewajiban sebagai entitas pelaporan akuntansi penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah "Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Yang Agung". Visi dimaksud bermakna sebagai berikut: menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional sebuah perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel,
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menjabarkannya melalui program dan kegiatan dari Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Program penegakan dan pelayanan hukum
2. Program dukungan manajemen.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal

neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7 Capaian Output

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan.

Berikut Capaian Output Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 diambil dari SAKTI.

Tabel 4. Capaian Output Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Per 30 Juni 2025

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
03.04.BF.1059 .AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara	2.480.000	1.600.000	64,52	1	0	Kegiatan	64,52	Konsumsi pengamanaan sidang
03.04.BF.1059 .AEA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	405.000	0	0	1	0	Perkara	0	Blm terdapat realisasi
03.04.BF.1059 .QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.000.000	13.900.000	42,12	96	62	orang	42,12	Realisasi vol 8 layanan pd bln Juni akan dibayarkan pd Juli
03.04.BF.1059 .QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan tata usaha negara	4.920.000	0	0	1	0	perkara	0	Blm terdapat realisasi

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 40.805.000. Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 5. Revisi Anggaran TA. 2025

Uraian	2025	
	DIPA ANGGARAN AWAL	DIPA ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNB	6.281.000	6.281.000
Jumlah Pendapatan	6.281.000	6.281.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	40.805.000	40.805.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	40.805.000	40.805.000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 3.232.000. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi
Pendapatan
Negara Rp
3.232.000

Tabel 6. Pendapatan PNB TA 2025

No	Uraian	Estimasi pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
Pendapatan				
1	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	280.000	70.000	25
2	Pendapatan Ongkos Perkara	790.000	770.000	97,47
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5.211.000	2.392.000	45,9
Total Pendapatan		6.281.000	3.232.000	51,46

Realisasi Pendapatan Uang Meja (Leges) pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (40.000) atau (36,36) persen dibandingkan TA 2024. Realisasi Pendapatan Ongkos Perkara mengalami kenaikan sebesar Rp 410.000 atau 113,89 persen dibandingkan TA 2024. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan pun mengalami kenaikan sebesar Rp 809.000 atau 51,11 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena lebih banyak jumlah perkara yang ditangani di Pengadilan Tata Usaha Negara pada periode sampai tanggal 30 Juni 2025 dibanding periode yang sama pada tahun yang lalu.

Perbandingan realisasi PNPB TA 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi PNPB per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Uraian	TA 2025	2024	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	70.000	110.000	(40.000)	(36,36)
2	Pendapatan Ongkos Perkara	770.000	360.000	410.000	113,89
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.392.000	1.583.000	809.000	51,11
	Total Pendapatan	3.232.000	2.053.000	1.179.000	57,43

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
: Rp
15.500.000*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 15.500.000 atau sebesar 37,99 persen dari anggaran senilai Rp. 40.805.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025

Uraian	31 Desember TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	40.805.000	15.500.000	37,99
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja	40.805.000	15.500.000	37,99

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (3.580.750) atau sebesar (18,77) persen dari realisasi tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain karena belum ada penyerapan belanja barang operasional dan belanja perjalanan dalam negeri.

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	15.500.000	19.080.750	(3.580.750)	(18,77)
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	15.500.000	19.080.750	(3.580.750)	(18,77)

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
: Rp 15.500.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 15.500.000 dan Rp 19.080.750.

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (3.580.750) atau sebesar (18,77) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain karena belum ada penyerapan belanja barang operasional dan belanja perjalanan dalam negeri.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	0	7.080.750	(7.080.750)	(100)
Belanja Barang Non Operasional	3.500.000	0	3.500.000	100
Belanja Jasa	12.000.000	12.000.000	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	15.500.000	19.080.750	(3.580.750)	(18,77)
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0	0
Jumlah Belanja	15.500.000	19.080.750	(3.580.750)	(18,77)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset

Aset Lancar: Rp 22.789.349

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Pengadilán Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 22.789.349 dan Rp 0.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 550.000

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilán Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 550.000 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024

N o.	Uraian	2025	2024
1	Saldo Kas (Tunai dan Bank)	350.000	0
2	Kuitansi UP belum di SPJ-kan	200.000	0
	Total	550.000	0

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp 4.289.349

C.2.Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 4.289.349 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara pengeluaran yang berasal dari UP/TUP, Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
1	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	4.289.349	0
	Total	4.289.349	0

C.3. Persediaan

*Persediaan: Rp
17.950.000*

Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 17.950.000 dan Rp. 0. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025	2024
1	Barang Konsumsi	17.950.000	0
	Total	17.950.000	0

Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek
Rp 5.039.349*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 5.039.349 dan Rp 0.

C.4. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga:
Rp 4.289.349*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.289.349 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah
1.	Dana Pihak Ketiga	4.289.349
	Jumlah	4.289.349

Dana Pihak Ketiga adalah uang panjar biaya perkara yang belum selesai pertanggungjawabannya per tanggal pelaporan.

C.5. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp 200.000*

Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 200.000 dan Rp 0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

C.6. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp. 550.000

Uang Muka Dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 550.000 dan Rp 0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

EKUITAS

C.7. Ekuitas

Ekuitas: Rp 17.750.000

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 17.750.000 dan Rp 0. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan Pnbp : Rp 3.232.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 3.232.000 dan Rp 2.053.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 15. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

No.	Uraian	2025	2024	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	70.000	110.000	(36,36)
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	770.000	360.000	113,89
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.392.000	1.583.000	51,11
	Total Pendapatan	3.232.000	2.053.000	57,43

Pendapatan Uang Meja (Leges) pada 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (40.000) atau (36,36) persen dibandingkan TA 2024. Realisasi Pendapatan Ongkos Perkara mengalami kenaikan sebesar Rp 410.000 atau 113,89 persen dibandingkan TA 2024. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan pun

mengalami kenaikan sebesar Rp 809.000 atau 51,11 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan karena lebih banyak jumlah perkara yang ditangani di Pengadilan Tata Usaha Negara pada periode sampai tanggal 30 Juni 2025 dibanding periode yang sama pada tahun yang lalu.

D.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp 15.700.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 15.700.000 dan Rp 19.080.750. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa selama TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp (3.380.750) atau (17,718) persen dibandingkan TA 2024. Hal ini dikarenakan penghematan belanja bahan untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Rincian Beban Barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Beban Barang Jasa per 31 Desember TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik(Turun) %
Beban Bahan	3.700.000	7.080.750	(47,75)
Beban Jasa Konsultan	12.000.000	12.000.000	0
Total Beban Barang dan Jasa	15.700.000	19.080.750	(17,718)

Terdapat Perbedaan nilai antara Beban Barang dan Jasa LO dan Belanja Barang dan Jasa LRA per 30 Juni 2025. Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 15.700.000 sedangkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 15.500.000, sehingga terdapat selisih Rp 200.000. Rincian perbedaan atau selisih untuk setiap akun adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Perbedaan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA per 30 Juni 2025

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Bahan	3.700.000	3.500.000	200.000
Beban Jasa Konsultan	12.000.000	12.000.000	0
Total	15.700.000	15.500.000	200.000

Perbedaan Nilai pada tabel di atas dikarenakan terdapat SPM yang belum SP2D senilai Rp 200.000.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal
Rp 0*

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus
(Defisit) LO Rp
(12.468.000)*

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (12.468.000) dan Rp (17.027.750). Surplus (Defisit) merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Rp
30.218.000*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 30.218.000 dan Rp 17.027.750. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 18. Rincian Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2025

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(3.232.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.500.000
Transfer Masuk	17.950.000
Jumlah	30.218.000

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp (3.232.000) sedangkan DKEL sebesar Rp 15.500.000.

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lainnya pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 17.950.000, berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara berupa 12 buah Toga Hakim senilai Rp 15.600.000, 1 buah Jas Panitera senilai Rp 1.050.000 dan 13 buah tanda Jabatan Hakim dan Panitera senilai Rp 1.300.000.

Tabel 18. Rincian Transfer Masuk Per 30 Juni 2025

Entitas Asal	Jenis	Jumlah	Nilai
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Toga Hakim	12	15.600.000
	Jas Panitera	1	1.050.000
	Tanda Jabatan Hakim dan Panitera	13	1.300.000
Jumlah			17.950.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 0.

E.4. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp 17.750.000*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 17.750.000 dan Rp 0.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang harus ditindaklanjuti.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah:

1. BRI KC Jakarta Veteran V/C 651555788021000 a.n. BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0.
2. BRI KC Jakarta Veteran V/C 651555788011000 a.n. BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 7.096.191.
3. BRI Yogyakarta Katamso A/C 00000245-01-001579-30-7 a.n. RPL 030 PTUN Yogyakarta yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 4.289.349.

F.2.3. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Februari 2025 Revisi I DIPA 05 tentang Efisiensi anggaran, Blokir Pagu;
2. Pada tanggal 20 Maret 2025 Revisi II DIPA 05 tentang Buka Blokir Pagu Efisiensi;
3. Pada tanggal 22 April 2025 Revisi III DIPA 05 tentang rencana penarikan hal III DIPA;
4. Pada tanggal 9 Juli 2025 Revisi IV DIPA 05 tentang penarikan hal III DIPA.

F.2.4. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.



**LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.05

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN

TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Telp./WA (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

Bantul - DI Yogyakarta 55198

E-mail : ptunjogja@mahkamahagung.go.id

Data Pendukung Laporan Keuangan

Daftar Isi

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua

Neraca Percobaan Akrua

Neraca Percobaan Kas

Laporan BMN

Daftar Rekening Kementerian/Lembaga

Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga

Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

LPJ Bendahara Pengeluaran

LPJ Bendahara Penerimaan

Kertas Kerja Telaah LK

Memo Jurnal Penyesuaian dan Koreksi

Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 578802

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM
Tgl Cetak : 15/07/25 9:46 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,281,000	3,232,000	(3,049,000)	51.46	4,364,000	2,053,000	(2,311,000)	47.04
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,281,000	3,232,000	(3,049,000)	51.46	4,364,000	2,053,000	(2,311,000)	47.04
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	6,281,000	3,232,000	(3,049,000)	51.46	4,364,000	2,053,000	(2,311,000)	47.04
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	40,805,000	15,500,000	(25,305,000)	37.99	42,310,000	19,080,750	(23,229,250)	45.1
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	40,805,000	15,500,000	(25,305,000)	37.99	42,310,000	19,080,750	(23,229,250)	45.1
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 578802

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM
Tgl Cetak : 15/07/25 9:46 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	40,805,000	15,500,000	(25,305,000)	37.99	42,310,000	19,080,750	(23,229,250)	45.1
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 15 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001

Neraca

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM

Tgl Cetak : 15/07/25 9:46 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	550,000	0	550,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,289,349	0	4,289,349	0.00
Persediaan	17,950,000	0	17,950,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	22,789,349	0	22,789,349	
JUMLAH ASET	22,789,349	0	22,789,349	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,289,349	0	4,289,349	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	200,000	0	200,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	550,000	0	550,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,039,349	0	5,039,349	
JUMLAH KEWAJIBAN	5,039,349	0	5,039,349	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	17,750,000	0	17,750,000	0.00
JUMLAH EKUITAS	17,750,000	0	17,750,000	
JUMLAH EKUITAS	17,750,000	0	17,750,000	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,789,349	0	22,789,349	

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 15 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP.197109061999032001

Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM

Tgl Cetak : 15/07/25 9:46 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,232,000	2,053,000	1,179,000	57.428
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,232,000	2,053,000	1,179,000	57.428
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,232,000	2,053,000	1,179,000	57.428
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	15,700,000	19,080,750	(3,380,750)	(17.718)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM

Tgl Cetak : 15/07/25 9:46 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,700,000	19,080,750	(3,380,750)	(17.718)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12,468,000)	(17,027,750)	4,559,750	(26.778)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12,468,000)	(17,027,750)	4,559,750	(26.778)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12,468,000)	(17,027,750)	4,559,750	(26.778)

Keterangan :

FINAL



Laporan Perubahan Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 15/07/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 15/07/25 9:46 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,468,000)	(17,027,750)	4,559,750	(26.78)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	30,218,000	17,027,750	13,190,250	77.46
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	17,750,000	0	17,750,000	0
EKUITAS AKHIR	17,750,000	0	17,750,000	0

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ASNURI DWI MASTUTI SH

NIP. 197109061999032001

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 578802
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
DI YOGYAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/07/25 9:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/7/25 8:24 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,905,000	6,905,000	3,500,000	0	3,500,000	50.69	3,405,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,205,000	7,205,000	3,500,000	0	3,500,000	48.58	3,705,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	28,800,000	12,000,000	0	12,000,000	41.67	16,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	28,800,000	28,800,000	12,000,000	0	12,000,000	41.67	16,800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	4,620,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	4,620,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	40,805,000	40,805,000	15,500,000	0	15,500,000	37.99	25,305,000
	JUMLAH BELANJA	40,805,000	40,805,000	15,500,000	0	15,500,000	37.99	25,305,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 05 **Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 578802 **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 15/07/25 9:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/7/25 8:24 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,905,000	6,905,000	3,500,000	0	3,500,000	50.69	3,405,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,205,000	7,205,000	3,500,000	0	3,500,000	48.58	3,705,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	28,800,000	12,000,000	0	12,000,000	41.67	16,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	28,800,000	28,800,000	12,000,000	0	12,000,000	41.67	16,800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	4,620,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,620,000	4,620,000	0	0	0	0	4,620,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	40,805,000	40,805,000	15,500,000	0	15,500,000	37.99	25,305,000
	JUMLAH BELANJA	40,805,000	40,805,000	15,500,000	0	15,500,000	37.99	25,305,000

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 578802

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
DI YOGYAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 15/07/25 9:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	280,000	70,000	0	70,000	25
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	790,000	770,000	0	770,000	97.47
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5,211,000	2,392,000	0	2,392,000	45.9
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	6,281,000	3,232,000	0	3,232,000	51.46
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	6,281,000	3,232,000	0	3,232,000	51.46
	JUMLAH PENDAPATAN	6,281,000	3,232,000	0	3,232,000	51.46

Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 005
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 578802

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
DI YOGYAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl. Cetak 15/07/2025 9:47 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

Neraca Percobaan Akrual

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/25 7:02 PM

Tgl Cetak : 15/07/25 9:46 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	550,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	4,289,349	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,950,000	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	4,289,349
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	200,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	550,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,500,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,232,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	17,950,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	70,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	770,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	2,392,000
3.0	521211	Beban Bahan	3,700,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	12,000,000	0
JUMLAH			41,721,349	41,721,349

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ASNURI DWI MASTUTI SH

NIP. 197109061999032001

Neraca Percobaan Kas

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Tgl Data : 15/07/25 6:26 AM
Tgl Cetak : 15/07/25 9:47 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	15,500,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,232,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	70,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	770,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	2,392,000
3.0	521211	Belanja Bahan	3,500,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	12,000,000	0
JUMLAH			18,732,000	18,732,000

Keterangan :
FINAL

Yogyakarta, 15 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

ASNURI DWI MASTUTI SH
197109061999032001

Laporan BMN

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB W : 005050400KD BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA

Tgl.Data : 23/07/25 12:26 PM
Tanggal : 23/07/25 3:23 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	19,741,200
J U M L A H		19,741,200

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAPPB-W : 005050400KD BA(005) ES1(05) DI YOGYAKARTA

Tanggal : 23/07/25 4:02 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_uappaw_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	120,000
1010301006	Ordner Dan Map	113,000
1010301013	Isi Staples	10,700
1010302001	Kertas HVS	827,500
1010304004	Tinta/Toner Printer	720,000
1010307001	Bahan Baku Pakaian	16,650,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,300,000
Jumlah Barang Konsumsi		19,741,200
TOTAL		19,741,200

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |

Daftar Rekening Kementerian/Lembaga

DAFTAR REKENING AKTIF SATUAN KERJA PADA WILAYAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
PERIODE 30 JUNI TAHUN 2025

No	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Saldo Akhir per 30 Juni 2025 (Rp.)
1	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK	005	05	Virtual Account	651555788021000	BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05	BRI KC Jakarta Veteran	Rp -
2	PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA	005	05	Virtual Account	651556632931000	BPG030 DILMIL II-11 YOGYAKARTA 05	BRI KC Jakarta Veteran	Rp -

Yogyakarta, 30 Juni 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Plt. Sekretaris PTUN Yogyakarta



RR. Asnuri Dwi Mastuti
 NIP. 197109061999032001

**DAFTAR REKENING LAINNYA (PERKARA) SATKER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
PERIODE 30 JUNI TAHUN 2025**

No.	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Saldo Akhir per 30 Juni 2021 (Rp.)
1	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YK	005	5	Giro	00245-01-001579-30-7	RPL 030 PTUN YOGYAKARTA	BRI Cab. Katamso	Rp 4.289.349,00

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Plt. Sekretaris PTUN Yogyakarta



RR. Asnuri Dwi-Mastuti

NIP. 197109061999032001

Monitoring Penutupan Rekening Kementerian/Lembaga

**MONITORING PENUTUPAN REKENING BANK
PTUN YOGYAKARTA**

TAHUN : 2025

NO	Nomor Rekening	Tanggal Penutupan	Saldo Yang Disetor	Tanggal & Surat bank	Keterangan
NIHIL					

Yogyakarta, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Plt. Sekretaris PTUN Yogyakarta



RR. Asnuri Dwi Mastuti
NIP. 197109061999032001

Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 578802
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	40,805,000	40,805,000	0
2	Belanja	15,500,000	15,500,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	6,281,000	6,281,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,232,000	3,232,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	550,000	550,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	550,000	550,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JUL-25



LPJ Bendahara Pengeluaran

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran
Periode LPJ : 2025-06
Sequence LPJ : 00001/LPJ/57880200/06/2025
Kode Satker : 578802
Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tanggal Kirim : 01/07/2025 12:19

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Yogyakarta (030) dengan timestamp 01/07/2025 14:37 WIB.

Petugas Validator LPJ :

Staf : SURWIDIYATI pada 01/07/2025 14:37.

Kasi : ENDANG ZAINATUN pada 01/07/2025 14:37.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-005.05.2.578802/2025

Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 350.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00011/KW/578802/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	150.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	350.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	150.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	350.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	150.000,00	900.000,00	700.000,00	350.000,00
	1. BP UP*)	150.000,00	900.000,00	700.000,00	350.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 200.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	350.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	350.000,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (IA 1 kolom (6))	Rp.	350.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	350.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	350.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	200.000,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	550.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	550.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00 karena -
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00 karena -
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00 karena -
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00 karena -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001

KAB. BANTUL, 30 Juni 2025

Bendahara Pengeluaran



SRI SUMIYATUNINGSIH, S.H.

NIP 198512022009042009

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2025-06

Kode Satker : 578802

Kode KPPN : 030

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.550,000.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.350,000.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.200,000.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.550,000.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.550,000.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.**
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.**
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.**

Dicetak pada tanggal, 30 Juni 2025

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Senin tanggal 30 bulan Juni tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 651555788021000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 350.000,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00011/KW/578802/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	350.000,00
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3 Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	350.000,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	350.000,00
2 Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4 Saldo Pajak	Rp.	0,00
5 Saldo Hibah	Rp.	0,00
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	350.000,00

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0,00

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	350.000,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	350.000,00

B. Selisih Kas (I.A-II.A.3)

Rp. 0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	350.000,00
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	200.000,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	550.000,00
2 a. Saldo TUP	Rp.	0,00
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3 Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	550.000,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	550.000,00
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	550.000,00

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A-III.B.4)

Rp. 0,00

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00 karena -

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00 karena -

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00 karena -

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00 karena -

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



SRI SUMIYATUNINGSIH, S.H.
NIP 198512022009042009

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



ASNURIDWI MASTUTI, SH
NIP 197108061999032001

***DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

SATKER 578802

BULAN : JUNI 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65155578802100	BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05	BRI KC JAKARTA VETERAN	20	S-1829/WPB.12/KP.06/2020	08-07-2020	2025-06-24	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



SRI SUMIYATUNINGSIH, S.H.

NIP 198512022009042009

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : JUNI 2025

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA57880200-
No Rekening : 651555788021000
Nama Rekening : BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05
Nama Bank : BRI KC JAKARTA VETERAN
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2025			0,00
02-06-2025	FPK-PENG-0IQbiUbXNVgJdtx	SP2D GUP	400.000,00	0,00	400.000,00
19-06-2025	FPK-PENG-hx8oTZDT26o6s7e	[DARI TUNAI] Pengambilan uang tunai berdasarkan SPR nomor 08/SEKPTUN.W3-TUN3/KU1.1.2/578802/VI/2025	0,00	400.000,00	0,00
20-06-2025	FPK-PENG-LnPLu3ypa7EcbU5	SP2D GUP	500.000,00	0,00	500.000,00
24-06-2025	FPK-PENG-XI0PSubnCmRa8Q	[DARI TUNAI] Pengambilan uang tunai berdasarkan SPR nomor 09/SEKPTUN.W3-TUN3/KU1.1.2/578802/VI/2025	0,00	500.000,00	0,00
Jumlah			900.000,00	900.000,00	0,00



BENDAHARA PENGELUARAN

SRI SUMIYATUNINGSIH, S.H.

NIP. 198512022009042009

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

LPJ Bendahara Penerimaan

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Penerimaan
Periode LPJ : 2025-06
Sequence LPJ : 00014/LPJPEN/578802/06/2025
Kode Satker : 578802
Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tanggal Kirim : 09/07/2025 09:00

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Yogyakarta (030) dengan timestamp 09/07/2025 12:31 WIB.

Petugas Validator LPJ :

Staf : SURWIDIYATI pada 09/07/2025 09:06.

Kasi : ENDANG ZAINATUN pada 09/07/2025 12:31.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.05.2.578802/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (030) Yogyakarta
 Alamat dan No Telp :

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 4.289.349,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

1	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	6.162.249,00	2.787.100,00	4.660.000,00	4.289.349,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	6.162.249,00	2.787.100,00	4.660.000,00	4.289.349,00
B.	BP Selain Kas	6.162.249,00	2.787.100,00	4.660.000,00	4.289.349,00
	1. BP PNB	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
	2. BP DPK	6.162.249,00	2.319.100,00	4.192.000,00	4.289.349,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	4.289.349,00
3.	Jumlah Kas	Rp	4.289.349,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	4.289.349,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	4.289.349,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	468.000,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	468.000,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	468.000,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	468.000,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	468.000,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : 0,00-

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



ASNURI DWI MASTUTI SH

NIP 197109061999032001

KAB. BANTUL , 04 Juli 2025

Bendahara Penerimaan

QORRY AINI HANI

NIP 199603152020122012

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Periode : 2025-06

Kode Satker : 578802

Kode KPPN : 030

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	PNBP dengan SBS Belum disetor	> 3 Hari Kalender	Rp.0.00
2	Rekening bendahara belum divalidasi	> 30 Hari	-

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Kas PNB	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
2	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Bank	Rp.0.00
3	Total Kas Bendahara	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.
- 2 Suplemen LPJ Bendahara Menjadi lampiran LPJ pada saat Konsep LPJ Disampaikan oleh Bendahara kepada KPA atau PPK.
- 3 KPA atau PPK Wajib memeriksa Lampiran Suplemen sebagai bahan pertimbangan sebelum Aprove LPJ.
- 4 KPPN memeriksa Lampiran Suplemen LPJ sebagai Bahan Pembinaan kepada satker mitra kerjanya.

Dicetak pada tanggal, 04 Juli 2025

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juni 2025

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 4.289.349,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00014/PKB/578802/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	4.289.349,00
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNBP	Rp.	0,00
2. BP DPK	Rp.	4.289.349,00
3. BP Pajak	Rp.	0,00
4. BP Lainnya	Rp.	0,00
5. Jumlah	Rp.	4.289.349,00
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	4.289.349,00
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	4.289.349,00
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	468.000,00
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0,00
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	468.000,00
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	468.000,00
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
0,00-
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0,00-

Bendahara Penerimaan



GORRY AINI HANI

NIP 199603152020122012



BUKU KAS UMUM

Periode Juni 2025

Departemen/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tgl. No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.05.2.578802/2025
Revisi Ke :1 : 21 Februari 2025 , DIPA-005.05.2.578802/2025
Revisi Ke :2 : 20 Maret 2025 , DIPA-005.05.2.578802/2025
Revisi Ke :3 : 22 April 2025 , DIPA-005.05.2.578802/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (030) Yogyakarta

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001

KAB. BANTUL , 04 Juli 2025

Bendahara Penerimaan,


QORRY AINI HANI
NIP 199603152020122012

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Mei 2025			6.162.249,00
03/06/2025	00034/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	40.000,00	0,00	6.202.249,00
03/06/2025	00034/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	40.000,00	6.162.249,00
05/06/2025	00035/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	30.000,00	0,00	6.192.249,00
05/06/2025	00036/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.000,00	0,00	6.202.249,00
05/06/2025	00035/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	30.000,00	6.172.249,00
05/06/2025	00036/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	10.000,00	6.162.249,00
17/06/2025	00037/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	166.000,00	0,00	6.328.249,00
17/06/2025	00038/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	30.000,00	0,00	6.358.249,00
17/06/2025	00037/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	166.000,00	6.192.249,00
17/06/2025	00038/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	30.000,00	6.162.249,00
23/06/2025	00039/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	40.000,00	0,00	6.202.249,00
23/06/2025	00040/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	80.000,00	0,00	6.282.249,00
23/06/2025	00039/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	40.000,00	6.242.249,00
23/06/2025	00040/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	80.000,00	6.162.249,00
30/06/2025	00041/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	72.000,00	0,00	6.234.249,00
30/06/2025	00041/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	72.000,00	6.162.249,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30/06/2025	00013/PKB/578802/2025	- Akumulasi Penerimaan 28 Mei - 30 Juni Tahun 2025 Sebesar Rp.2.319.100,-	2.319.100,00	0,00	8.481.349,00
30/06/2025	00014/PKB/578802/2025	- Akumulasi Pengeluaran Bulan Juni Tahun 2025 Sebesar Rp.4.192.000,-	0,00	4.192.000,00	4.289.349,00
		Jumlah	2.787.100,00	4.660.000,00	4.289.349,00

Kuasa Pengguna Anggaran



ASNURI DWI MASTUTI SH

NIP 197109061999032001

KAB. BANTUL, 04 Juli 2025

Bendahara Penerimaan

QORRY AINI HANI

NIP 199603152020122012

Buku Pembantu PNB
Periode Juni 2025

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Saluan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tgl. No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.05.2.578802/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Mei 2025			0,00
03/06/2025	00034/SBS/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	40.000,00	0,00	40.000,00
03/06/2025	00034/SSBP/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	40.000,00	0,00
05/06/2025	00035/SBS/578802/2025	Pendapatan Ongkos Perkara	30.000,00	0,00	30.000,00
05/06/2025	00036/SBS/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.000,00	0,00	40.000,00
05/06/2025	00035/SSBP/578802/2025	Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	30.000,00	10.000,00
05/06/2025	00036/SSBP/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	10.000,00	0,00
17/06/2025	00037/SBS/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	168.000,00	0,00	168.000,00
17/06/2025	00038/SBS/578802/2025	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	30.000,00	0,00	196.000,00
17/06/2025	00037/SSBP/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	168.000,00	30.000,00
17/06/2025	00038/SSBP/578802/2025	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	30.000,00	0,00
23/06/2025	00039/SBS/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	40.000,00	0,00	40.000,00
23/06/2025	00040/SBS/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	80.000,00	0,00	120.000,00
23/06/2025	00039/SSBP/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	40.000,00	80.000,00
23/06/2025	00040/SSBP/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	80.000,00	0,00

30/06/2025	00041/SBS/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	72.000,00	0,00	72.000,00
30/06/2025	00041/SSBP/578802/2025	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	72.000,00	0,00
Jumlah			468.000,00	468.000,00	0,00

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


ASNURI DWI MASTUTI SH
NIP 197109061999032001

KAB. BANTUL , 04 Juli 2025
Bendahara Penerimaan,


QORRY AINI HANI
NIP 199603152020122012

Buku Pembantu 425232 - Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan

Kementrian/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-005.05.2.578802/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
12 Februari 2025	00004/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	10.000,00	0,00	10.000,00
12 Februari 2025	00004/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	10.000,00	0,00
24 Maret 2025	00016/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	10.000,00	0,00	10.000,00
24 Maret 2025	00016/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	10.000,00	0,00
25 April 2025	00019/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	20.000,00	0,00	20.000,00
25 April 2025	00019/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	20.000,00	0,00
17 Juni 2025	00038/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	30.000,00	0,00	30.000,00
17 Juni 2025	00038/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	30.000,00	0,00
J U M L A H			70.000,00	70.000,00	0,00

Buku Pembantu 425233 - Pendapatan Ongkos Perkara

Kementrian/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-005.05.2.578802/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
25 Februari 2025	00008/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	50.000,00	0,00	50.000,00
25 Februari 2025	00008/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	50.000,00	0,00
28 Februari 2025	00009/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	60.000,00	0,00	60.000,00
28 Februari 2025	00009/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	60.000,00	0,00
14 Maret 2025	00013/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	50.000,00	0,00	50.000,00
14 Maret 2025	00013/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	50.000,00	0,00
27 Maret 2025	00018/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	200.000,00	0,00	200.000,00
27 Maret 2025	00018/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	200.000,00	0,00
25 April 2025	00020/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	50.000,00	0,00	50.000,00
29 April 2025	00023/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	200.000,00	0,00	250.000,00
25 April 2025	00020/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	50.000,00	200.000,00
29 April 2025	00023/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	200.000,00	0,00
07 Mei 2025	00025/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	100.000,00	0,00	100.000,00

Buku Pembantu 425233 - Pendapatan Ongkos Perkara

Kementrian/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-005.05.2.578802/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
20 Mei 2025	00030/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	30.000,00	0,00	130.000,00
07 Mei 2025	00025/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	100.000,00	30.000,00
20 Mei 2025	00030/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	30.000,00	0,00
05 Juni 2025	00035/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	30.000,00	0,00	30.000,00
05 Juni 2025	00035/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Ongkos Perkara	0,00	30.000,00	0,00
J U M L A H			770.000,00	770.000,00	0,00

Buku Pembantu 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Kementrian/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-005.05.2.578802/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
15 Januari 2025	00001/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	20.000,00	0,00	20.000,00
30 Januari 2025	00002/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	50.000,00	0,00	70.000,00
31 Januari 2025	00003/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	40.000,00	0,00	110.000,00
15 Januari 2025	00001/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	20.000,00	90.000,00
30 Januari 2025	00002/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	50.000,00	40.000,00
31 Januari 2025	00003/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	40.000,00	0,00
12 Februari 2025	00005/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.000,00	0,00	10.000,00
17 Februari 2025	00006/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya - PNBP Salinan Putusan	50.000,00	0,00	60.000,00
12 Februari 2025	00005/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	10.000,00	50.000,00
17 Februari 2025	00006/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya - PNBP Salinan Putusan	0,00	50.000,00	0,00
24 Februari 2025	00007/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	170.000,00	0,00	170.000,00
24 Februari 2025	00007/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	170.000,00	0,00

Buku Pembantu 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Kementrian/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 Tgl. No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-005.05.2.578802/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
28 Februari 2025	00010/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	74.000,00	0,00	74.000,00
28 Februari 2025	00010/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	74.000,00	0,00
13 Maret 2025	00011/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	30.000,00	0,00	30.000,00
14 Maret 2025	00012/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	145.000,00	0,00	175.000,00
13 Maret 2025	00011/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	30.000,00	145.000,00
14 Maret 2025	00012/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	145.000,00	0,00
18 Maret 2025	00014/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	58.500,00	0,00	58.500,00
18 Maret 2025	00014/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	58.500,00	0,00
24 Maret 2025	00015/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	40.000,00	0,00	40.000,00
24 Maret 2025	00015/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	40.000,00	0,00
27 Maret 2025	00017/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	30.000,00	0,00	30.000,00
27 Maret 2025	00017/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	30.000,00	0,00
25 April 2025	00021/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	602.000,00	0,00	602.000,00

Buku Pembantu 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Kementrian/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 Tgl. No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-005.05.2.578802/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
29 April 2025	00022/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	24.500,00	0,00	626.500,00
30 April 2025	00024/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	30.000,00	0,00	656.500,00
25 April 2025	00021/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	602.000,00	54.500,00
29 April 2025	00022/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	24.500,00	30.000,00
30 April 2025	00024/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	30.000,00	0,00
07 Mei 2025	00026/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	80.000,00	0,00	80.000,00
15 Mei 2025	00027/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	120.000,00	0,00	200.000,00
19 Mei 2025	00028/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	110.000,00	0,00	310.000,00
20 Mei 2025	00029/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.000,00	0,00	320.000,00
21 Mei 2025	00031/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	30.000,00	0,00	350.000,00
23 Mei 2025	00032/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	140.000,00	0,00	490.000,00
26 Mei 2025	00033/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	120.000,00	0,00	610.000,00
07 Mei 2025	00026/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	80.000,00	530.000,00

Buku Pembantu 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Kementrian/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-005.05.2.578802/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
15 Mei 2025	00027/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	120.000,00	410.000,00
19 Mei 2025	00028/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	110.000,00	300.000,00
20 Mei 2025	00029/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	10.000,00	290.000,00
21 Mei 2025	00031/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	30.000,00	260.000,00
23 Mei 2025	00032/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	140.000,00	120.000,00
26 Mei 2025	00033/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	120.000,00	0,00
03 Juni 2025	00034/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	40.000,00	0,00	40.000,00
05 Juni 2025	00036/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.000,00	0,00	50.000,00
17 Juni 2025	00037/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	166.000,00	0,00	216.000,00
23 Juni 2025	00039/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	40.000,00	0,00	256.000,00
23 Juni 2025	00040/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	80.000,00	0,00	336.000,00
30 Juni 2025	00041/SBS/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	72.000,00	0,00	408.000,00
03 Juni 2025	00034/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	40.000,00	368.000,00

Buku Pembantu 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya

Kementrian/ Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi/ Kabupaten/ Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (578802) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-005.05.2.578802/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (030) Yogyakarta

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
05 Juni 2025	00036/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	10.000,00	358.000,00
17 Juni 2025	00037/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	166.000,00	192.000,00
23 Juni 2025	00039/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	40.000,00	152.000,00
23 Juni 2025	00040/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	80.000,00	72.000,00
30 Juni 2025	00041/SSBP/578802/2025	QORRY AINI HANI Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0,00	72.000,00	0,00
J U M L A H			2.392.000,00	2.392.000,00	0,00

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATKER 578802 (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA)
BULAN : JUNI 2025

No.	TANGGAL SETOR	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	03/06/2025	QORRY AINI HANI	3536B2G5031M519M	250603010422	411613912541000	425239	40,000.00
2	05/06/2025	QORRY AINI HANI	351BD3CIFTK4RC38	250605017935	411613912541000	425233	30,000.00
3	05/06/2025	QORRY AINI HANI	4E6473CIFTK4RCBM	250605017985	411613912541000	425239	10,000.00
4	17/06/2025	QORRY AINI HANI	25F0E7QLV2GDRBRE	250617007490	411613912541000	425239	166,000.00
5	17/06/2025	QORRY AINI HANI	F575B2G50323DC09	250617007529	411613912541000	425232	30,000.00
6	23/06/2025	QORRY AINI HANI	20B3A2G50328VGN0	250623005133	411613912541000	425239	80,000.00
7	23/06/2025	QORRY AINI HANI	2C46055DFIPE6G4F	250623005082	411613912541000	425239	40,000.00
8	30/06/2025	QORRY AINI HANI	BDDFB2G5032GIKDR	250630016376	411613912541000	425239	72,000.00
Jumlah							468,000.00

BENDAHARA PENERIMAAN



Tanggal/Jam Cetak : 04/07/2025 01:31 PM

Halaman : 1/1

REKAPITULASI KONFIRMASI SETORAN PNBP
SATKER 578802 (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA)
BULAN : JUNI 2025

No.	AKUN	NAMA AKUN	NILAI SETOR
1	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	30,000.00
2	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	30,000.00
3	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	408,000.00
Jumlah			468,000.00

BENDAHARA PENERIMAAN



GORRY AINI HANI

NIP 199603152020122012

Tanggal/Jam Cetak : 04/07/2025 01:31 PM

Halaman : 1/1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Yogyakarta - 030

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pajak PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA (578802)

Cetak Tanggal 30-06-2025

Periode : 2025-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198512022009042009 pada 30-06-
2025 09:38:29 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Yogyakarta - 030

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBPN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA (578802)

Cetak Tanggal 30-06-2025

Periode : 2025-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198512022009042009 pada 30-06-
2025 09:38:29 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Yogyakarta - 030

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA (578802)

Cetak Tanggal 30-06-2025

Periode : 2025-06

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198512022009042009 pada 30-06-
2025 09:38:29 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 04-07-2025

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	030	578802	2025-06-23	Bendahara Penerimaan	20B3A2G50328VGN0	425239	IDR	80,000	ADA
					250623005133				
2	030	578802	2025-06-17	Bendahara Penerimaan	25F0E7QLV2GDRBRE	425239	IDR	166,000	ADA
					250617007490				
3	030	578802	2025-06-23	Bendahara Penerimaan	2C46055DFIPE6G4F	425239	IDR	40,000	ADA
					250623005082				
4	030	578802	2025-06-05	Bendahara Penerimaan	351BD3CIFTK4RC38	425233	IDR	30,000	ADA
					250605017935				
5	030	578802	2025-06-03	Bendahara Penerimaan	3536B2G5031M519M	425239	IDR	40,000	ADA
					250603010422				
6	030	578802	2025-06-05	Bendahara Penerimaan	4E6473CIFTK4RCBM	425239	IDR	10,000	ADA
					250605017985				
7	030	578802	2025-06-30	Bendahara Penerimaan	BDDFB2G5032GIKDR	425239	IDR	72,000	ADA
					250630016376				
8	030	578802	2025-06-17	Bendahara Penerimaan	F575B2G50323DC09	425232	IDR	30,000	ADA
					250617007529				

TOTAL

468,000



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan.
Dicetak oleh 199603152020122012 pada 04-07-
2025 13:18:17 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 04-07-2025

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								-	-

Tanggal/Jam Cetak : 04-07-2025 13:18



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199603152020122012 pada 04-07-
2025 13:18:16 WIB.

**DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 578802 (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA)**

BULAN : JUNI 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	024501001579307	RPL 030 PDT PTUN YOGYAKARTA BY PKR	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. - KATAMSO YOGYAKARTA	30	S-1684/KPN.1501/2024	28-10-2024	30-06-2025	4,289,349.00

Bendahara Penerimaan


GORRY AINI HANI
 NIP 199603152020122012

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (05)
PENGOADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA (578802)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILMILT (032901xxxxxx307)
Virtual Account : 651555788021000 | BPG 030 PTUN YOGYAKARTA 05
Periode : 01-06-2025 s/d 30-06-2025

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-06-02	14:00:05	40119804	From 032901003295305 to 651555788021000 SETORAN_65155_5788021000 250301301006488000001 dari 032901003295305	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	SPAN	
2025-06-19	09:44:02	40563650	tarik tunai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2025-06-20	12:07:55	40607123	From 032901003295305 to 651555788021000 SETORAN_65155_5788021000 259991310096170000001 dari 032901003295305	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	SPAN	
2025-06-24	11:20:54	40597951	tarik tunai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		900.000,00	900.000,00			
			Saldo Akhir				0,00		

Kertas Kerja Telaah LK

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (578802) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
 Kode dan Nama UAPPAW : (400578802) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
 Kode dan Nama Eselon 1 : (05) Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
 Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	V	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	V	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGCEKAKAN PADA MONSAKTI			
To Do List		Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V
a.	Pagu/DIPA		V
b.	Estimasi PNB		V
c.	Belanja		V
d.	Pengembangan Belanja		V

	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU			Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah			Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung			Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukal, Material dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak

4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruel?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya

5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito			Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) atau akun-akun		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST				
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		V	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		V	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Ya

		Ya	Tidak	Seharusnya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan AkruaI		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan AkruaI			Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan AkruaI		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan AkruaI			Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI		V	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU				
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
LAK BLU				
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaI BLU?	Ya		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"</i>				
1.	Nilai persediaan (di Neraca) pada bagian Telaah Antar Laporan Keuangan poin 3, berada pada kolom "Ya" sedangkan Beban Persediaan (di LO) berada pada kolom "Tidak".			
 Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (RR ASNURI DWI MASTUTI, S.H) NIP. 197109061999032001		Bantul, 24 Juli 2025 Penelaah, (Dedianto Ramali) NIP. 198206112006041004		

Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 Eselon I : BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 Wilayah : INSTANSI PUSAT
 Satuan Kerja : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
 No. Dokumen : 002/rpl.GLP.578802/2024
 Tanggal : 01-Jan-25
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : JURNAL BALIK AWAL TAHUN

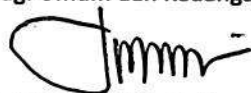
KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

☐ Pendapatan Diterima Di Muka	☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Belanja Dibayar Di Muka	☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐ Transfer Masuk
☐ Penyisihan Piutang	☐ Transfer Keluar
☐ Penghapusan Piutang	☐ Koreksi Beban Aset
☐ Penyusutan Aset	☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☒ Kas Di Bendahara Penerimaan	☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ Uang Muka Belanja
☐ Persediaan	☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Antar Beban	☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐ Hibah Langsung
☐ Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	☐

JURNAL PENYESUAIAN :

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	Dana Pihak Ketiga		Rp 2.671.249,00
	K	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	Rp 2.671.249,00	
		Jumlah	Rp 2.671.249,00	Rp 2.671.249,00

Dibuat oleh :
Kasub. Bag. Umum dan Keuangan



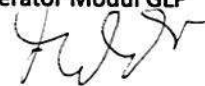
RR. Asnuri Dwi Mastuti
Tanggal : 1 Januari 2025

Disetujui oleh :
KPA



RR. Asnuri Dwi Mastuti
Tanggal : 1 Januari 2025

Direkam oleh :
Operator Modul GLP



Dedi Ramali
Tanggal : 1 Januari 2025